

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai dana pensiun dalam suatu hubungan kerja. Selain itu, pembahasan dalam skripsi ini juga mencakup tentang kepastian hukum bagi pekerja dalam hal dana pensiun dijadikan sebagai pengurang bagi perhitungan uang pesangon dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kajian hukum Islam. Metode yang digunakan Penulis adalah penelitian normatif. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi putusan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1407 K/Pdt.Sus-PHI/2020, serta menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan dan sumber bahan hukum pendukung seperti literature. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim Kasasi memutuskan bahwa tidak ada pemotongan uang pesangon dengan saldo Dana Pensiun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan Dana Pensiun dapat mengurangi Hak-Hak Pekerja.

Kata Kunci: *Dana Pensiun, Hak Pekerja, Uang Pesangon Pekerja.*

ABSTRACT

This thesis analyzes the arrangement of pension funds in an employment relations. In addition, the discussion in this thesis also includes about legal certainty of workers when the pension is used as a deduction for severance pay calculation from Indonesian legislation and regulations on Islamic law. The method used by the author is normative research. This study uses a decision-making approach to the Supreme Court's Decision Number: 1407 K/Pdt.Sus-PHI/2020, and uses sources to support secondary data such as legislation and legal sources such as literature. As a result of this research, the Court of Cassation judge determined that there is no deduction of severance pay with the balance of the Pension Fund. From this it can be concluded that it is not justified for pension funds to reduce workers' Rights.

Keywords: *Pension Fund, Workers' Rights, Severance Pay for Workers.*